ANALISIS PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN SEKOLAH ISLAM TERPADU (SIT) AL-FURQON

Arta Amaliah Nur Afifah*¹, Siti Rochmiyatun²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri
KM.3,5 Palembang, Sumatera Selatan, 30126 Indonesia, Telp: (0711)-354668 / Fax :
(0711)-356209

e-mail: *¹artaamaliah@gmail.com, ²sitirochmiyatun_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

This study aims to reveal the management of productive waqf and the application of the Principles of Good Corporate Governance in the Management of Productive Waqf at The Al-Furqon Integrated Islamic School Foundation (IISF). Methods of data collection using field research techniques with interviews, observation, and documentation. Data analysis used a qualitative descriptive method with steps data reduction, data display, and conclusion drawing which showed that the management of productive waqf at The Al-Furqon Integrated Islamic School Foundation (IISF) had been managed properly and met the requirements indicators of the Principles of Good Corporate Governance. Application of the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness can be applied in the productive waqf management system at The Al-Furqon Integrated Islamic School Foundation (IISF). Although the accountability principle has not fully fulfilled the Good Corporate Governance Principles.

Keywords: Good Corporate Governance, Management, Productive Waqf

PENDAHULUAN

Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon Palembang mengembangkan pengelolaan wakaf produktif melalui lembaga pendidikannya. Pada awalnya biaya operasional dianggap cukup untuk pengelolaan tanah wakaf yang diolah secara tradisional. Namun seiring perkembangan dan kemajuan, pihak yayasan mengembangkan sumber-sumber wakaf sehingga menjadi wakaf produktif. Mengelola dan membangun unit-unit usaha dan perdagangan yang dijadikan alat pemberdayaan wakaf, seperti tanah yang dijadikan Gedung Sekolah, Gedung Auditorium yang biasa disewakan untuk acara seminar dan pernikahan, serta Asrama Sekolah yang dijadikan asrama bagi siswa/i SMP dan SMA Islam Terpadu Al-Furqon. Sebagai salah satu lembaga yang bergerak dibidang pendidikan yang mengembangkan pengelolaan wakaf produktif untuk membiayai lembaga pendidikannya Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon perlu menerapkan sistem tata kelola yang baik yang dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance merupakan sistem pengelolaan organisasi yang mampu mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang baik, bersih, transparan, dan profesional untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para stakeholder maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia sebagai regulator perekonomian nasional menyadari mengenai peran penting penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia. Penerapan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di dalam suatu perusahaan/ organisasi diharapkan mampu untuk melahirkan dan menempatkan profesional yang jujur, memiliki integritas, bertanggung jawab, memiliki semangat kerja keras, inovatif, dan independen untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Penerapan *Good Corporate Governance* tidak hanya diterapkan pada organisasi bisnis baik yang bersifat profit oriented saja akan tetapi juga perlu diterapkan pada lembaga atau perusahaan nirlaba. Salah satu lembaga yang bisa diterapkan prinsip *Good Corporate Governance* adalah lembaga wakaf yang mengelola wakafnya secara produktif membutuhkan adanya penguatan dari sisi kelembagaan. Dalam pengelolaan wakaf produktif, pengelola wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf, dan menjaga hubungan baik antara nazhir, waqif, dan masyarakat sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Maka diperlukan, sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan dalam satu kelompok sebagai pelaksana aktivitas organisasi agar koordinasi sumber daya manusia dengan sumber daya materiil berjalan secara efektif dalam proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan pengelolaan wakaf dengan sistemik berbasis *Good Corporate Governance*. Dengan menggunakan lima prinsip dasar diantaranya *Fairness* (Kewajaran), *Transparency* (Keterbukaan), *Accountability* (Akuntabilitas), dan *Responsibility* (Pertanggungjawaban) dan *Independency* (Independensi). Oleh karena itu, akan dilakukan riset yang berjudul “**Analisis Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon**”.

LANDASAN TEORI

Wakaf

Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'il madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari*), dan *waqfan* (*isim mashdar*) yang secara etimologi (bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam ditempat, atau menahan. Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa* (*fi'il madhy*), *yahbisu* (*fi'il mudhari'*), dan *habsan* (*isim mashdar*) yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan.¹

Wakaf menurut Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 di dalam Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

¹ Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hal 3-4

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.² Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Ali Imran/3:92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Wakaf Produktif

Terminologi wakaf produktif dapat dipahami sebagai wakaf yang dilakukan untuk memperoleh prioritas utama yang bertujuan sebagai upaya pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan menghasilkan. Bentuk-bentuk pengembangan potensi wakaf secara produktif adalah dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, serta usaha-usaha produktif lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³

Pengelolaan Wakaf Produktif

Sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang dapat dijadikan sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.⁴

Good Corporate Governance

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu tata kelola perusahaan yang harus diimplementasikan agar tercapai kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.⁵

Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI), mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.⁶

Prinsip Good Corporate Governance

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, transparansi

² Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

³ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 91

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), hal. 56

⁵ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: KNKG, 2006), hal. 2

⁶ *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2000.

diperlukan agar perusahaan menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, perusahaan mitra, pengguna jasa, dan pemangku kepentingan lainnya.⁷

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar dari akuntabilitas yaitu jika didalam perusahaan atau organisasi harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan, wajar serta harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan atau organisasi dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.⁸

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar dari responsibilitas yaitu perusahaan atau organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan program dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan dan masyarakat.⁹

4. Independensi (*Independency*)

Dalam hubungan dengan asas independensi, perusahaan harus dikelola dengan independen sehingga masing-masing perusahaan beserta jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Prinsip dasar independensi ini adalah masing-masing perusahaan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan, dan bebas dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.¹⁰

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip dasar dari kewajaran adalah perusahaan atau organisasi harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan dan harus memberikan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugas secara profesional.¹¹

Indikator-Indikator GCG

Tabel
Indikator-Indikator Prinsip *Good Corporate Governance*

⁷ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Konsultan Aktuaria Indonesia*, (Jakarta: KNKG, 2011), hal. 9

⁸ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Indonesia*, (Jakarta: KNKG, 2008), hal. 11

⁹ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Konsultan Aktuaria*, *Op.Cit.*, hal. 11

¹⁰ *Ibid.*, hal. 9

¹¹ *Ibid.*, hal. 10

1.	Transparansi a. Rencana kerja tahunan b. Laporan keuangan berkala triwulan, tengah tahunan, dan tahunan c. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi d. Penggunaan teknologi informasi
2.	Akuntabilitas a. Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat b. Komite audit dan manajemen resiko c. Koordinasi program kerja d. Evaluasi program kerja/kegiatan
3.	Responsibilitas a. Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan b. Kewajiban sosial perusahaan (CSR) c. Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan d. Keterbukaan informasi sesuai regulasi e. Etika, moral, dan akhlak
4.	Independensi a. Program dan aktivitas bersifat independen dan bebas b. Kondisi bahwa pihak luar dilarang mencampuri urusan lembaga c. Kondisi menghindari kepentingan pihak luar d. Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ dalam lembaga
5.	Kewajaran dan Kesetaraan a. Terbuka dalam menerima kritik dan saran b. Kondisi kerja yang baik dan aman c. Keadaan memperlakukan dengan adil dan jujur

Sumber: Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006¹²

Literatur Review

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, penelitian thesis yang ditulis oleh Mochamad Fariz Irianto tahun 2019 dengan judul “Implementasi Good Corporate Governance Dalam Upaya Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Kota Batu Jawa Timur)”. Fokus penelitian dalam thesis ini adalah mengenai tata kelola program wakaf tunai di Masjid At-Taqwa melalui tiga tahapan yaitu proses perencanaan wakaf tunai, proses pelaksanaan wakaf tunai dan proses evaluasi wakaf tunai. Dengan penerapan *Good Corporate Governance* khususnya dalam prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat, terlaksananya audit dan manajemen resiko koordinasi program kerja, adanya evaluasi terhadap program kerja, sosialisasi atas rencana kerja dan sistem akuntansi berbasis standar akuntansi kepada stakeholder, penyediaan informasi laporan keuangan secara periodik serta penggunaan teknologi informasi untuk penyediaan laporan keuangan dan kegiatan. Memberikan dampak positif dengan meningkatnya

¹² Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: KNKG, 2006), hal. 5-7

kepercayaan publik terhadap program wakaf tunai di Masjid At-Taqwa terbukti dengan jumlah penerimaan wakaf yang melebihi dari target yang ditetapkan.

Selanjutnya penelitian kedua adalah penelitian skripsi yang ditulis oleh Endriyana tahun 2016 dengan judul “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta)”. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah menjadikan prinsip good corporate governance sebagai standarisasi sistem dalam hal pengelolaan zakat. Secara keseluruhan telah dilaksanakan pada lembaga amil zakat dompet dhuafa, walaupun didalam transparansi yang terdapat dalam peraturannya menyebutkan untuk hal pelaporannya juga melibatkan pemerintah daerah selaku penerima laporan. Dalam mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan, penerapan prinsip *good corporate governance* memberikan manfaat dalam proses pengambilan keputusan yang akan berlangsung secara lebih baik yang akan menghasilkan keputusan yang optimal serta dapat meningkatkan efisiensi sehingga terciptanya budaya kerja yang lebih sehat, meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki terhadap suatu perusahaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dibantu oleh olah teori kepustakaan. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Case Study Research* atau studi kasus yang memberikan deskripsi tentang individu memahami latar belakang persoalan secara mendalam, utuh, holistik, insentif dan naturalistic. Bersifat deskriptif serta *Content Analyst* dengan berusaha untuk memaparkan data-data atau fakta-fakta yang sebenarnya terkait dengan permasalahan dengan intepretasi yang tepat kemudian menganalisanya.

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara bertahap dan mendalam (*In-depth interview*), diskusi atau pengamatan, observasi dan dokumentasi lalu disajikan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Lokasi penelitian di Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang yang terletak di Jalan Jl. R. Sukamto No. 1332 Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Hj. Desmawati, S.E., M.Si., selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan SIT Al-Furqon, Bapak H. Emil Rosmali, S.E., M.M., M.H., selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan SIT Al-Furqon, dan Ibu Dwi Murni, S.E., selaku Kepala Keuangan SIT Al-Furqon.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penyajian data-data yang selanjutnya akan dianalisis dengan memberikan penjelasan agar dapat dibaca serta diinterpretasikan, sehingga dapat menggambarkan, menjelaskan serta menguraikan keadaan sebenarnya. Dengan langkah-langkah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing (verifikasi dan kesimpulan) yang menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Yayasan SIT Al-Furqon telah dikelola secara baik dan memenuhi indikator dari Prinsip Good Corporate Governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon

Upaya yang dilakukan oleh Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon dalam mengelola tanah wakafnya secara produktif melalui Lembaga Pendidikan Islamnya. Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon memiliki beberapa divisi dalam mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikannya, salah satunya adalah Divisi Litbang SIT Al-Furqon.¹³ Divisi Litbang bertugas untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas kerja bagi pengurus lembaga, guru-guru, karyawan dan unit-unit usaha. Sehingga aset-aset wakaf dapat berkembang dan berdaya dalam memfasilitasi berbagai kegiatan akademik serta menjadi salah satu instrumen yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umat.

Pola pemberdayaan wakaf produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon selain dalam lembaga pendidikannya juga dilaksanakan melalui unit-unit usaha sekolah yang dibangun untuk kepentingan pendidikan. Adapun aset wakaf yang terdata di Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon dimulai dari Gerbang Masuk Sekolah hingga ke Belakang Gedung Sekolah.¹⁴ Yang terdiri dari:

Tabel 1.1.

Data Aset Wakaf Yayasan SIT Al-Furqon Palembang

No.	Benda Wakaf	Luas/Banyaknya	Lokasi
1.	Tanah	6000 m ²	Jl. R. Sukamto No. 1332 Palembang
2.	Gedung SDIT Terdiri dari: ▪ Ruang Kelas ▪ Lab Komputer ▪ Ruang Multimedia ▪ Ruang Serbaguna ▪ Studio Mini ▪ Unit Kesehatan Sekolah	1 unit/ 3 lantai 30 ruangan 1 ruangan 2 ruangan 1 ruangan 1 ruangan 1 ruangan	
3.	Gedung PGIT&TKIT	1 unit	
4.	Masjid/ Mushola	1 unit	
5.	Ruang Koperasi	1 unit	
6.	Dapur	1 unit	

Sumber: Ibu Dwi Murni, S.E., Kepala Keuangan SIT Al-Furqon, 27 Januari 2020¹⁵

Pada dasarnya, harta benda wakaf secara keseluruhan di Yayasan Sekolah Islam (SIT) Al-Furqon diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat melalui proses pendidikan para siswa sebagai ujung tombak penerus bangsa. Nadzhir mengembangkan harta wakaf tersebut dalam bentuk usaha secara independen. Menurut Bapak Emil Rosmali selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon rencana kedepan Yayasan dalam pengembangan

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Hj. Desmawati, S.E., M.Si., selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon, pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 09:00 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Dwi Murni, S.E., selaku Kepala Keuangan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon, pada tanggal 27 Januari 2020, pukul 11:20 WIB

wakaf produktif adalah membangun Perguruan Tinggi Islam Swasta Al-Furqon untuk mengembangkan lembaga pendidikannya serta sebagai wadah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Palembang.¹⁶

Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan SIT Al-Furqon

1. Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menilai bahwa prinsip transparansi pada Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon menunjukkan bahwa indikator-indikator telah dilaksanakan dengan baik sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Indikator Prinsip Transparansi (*Transparancy*)

Indikator Transparansi (<i>Transparancy</i>)	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Rencana kerja tahunan	✓	
Laporan keuangan berkala triwulan, tengah tahunan, dan tahunan	✓	
Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi	✓	
Penggunaan teknologi informasi	✓	

Sumber: diolah data lapangan, 30 Januari 2020

a. Rencana Kerja Tahunan

Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon memiliki rencana kerja tahunan yang dibagi per unit yang disebut dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Rencana kerja yang disusun dalam rapat koordinasi program rencana kerja yang telah disepakati di dalam rapat akan dirapatkan kembali oleh Kepala Sekolah per unit bersama Kepala Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon dan akan disetujui oleh Direktur Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon sebagai rencana kerja dan rencana anggaran biaya kegiatan satu tahun kedepan.¹⁷

b. Laporan Keuangan Berkala Triwulan, Tengah Tahunan, dan Tahunan

Laporan berkala triwulan dan tengah tahunan tidak dibagikan ke publik hanya dikonsumsi secara intern oleh pihak Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon. Sedangkan laporan keuangan tahunan diperuntukan untuk konsumsi pajak dan tidak kepada publik. Berdasarkan referensi dari pajak bahwa aset wakaf diharuskan nolkan laporan keuangannya. Namun tetap pengembangan dari harta wakaf tersebut menjadi penambah di aktiva dan dilaporkan di dalam laporan keuangan.¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan Bapak H. Emil Rosmali, S.E., M.M., M.H., selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon, pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 09:00 WIB

¹⁷ Wawancara dengan Bapak H. Emil Rosmali, S.E., M.M., M.H., pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 09:00 WIB

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Dwi Murni, S.E., pada tanggal 27 Januari 2020, pukul 11:30 WIB

c. Sistem Akuntansi Berbasis Standar Akuntansi

Sistem akuntansi yang diterapkan adalah sistem akuntansi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.¹⁹ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 bertujuan untuk mengatur laporan keuangan yang lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.²⁰ Dalam sistem akuntansi pengelolaan wakaf produktif kedepannya akan menerapkan sistem akuntansi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 112 sehingga sistem akuntansi mengenai wakaf dapat diterapkan lebih baik lagi.

d. Penggunaan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan sangat penting dalam era revolusi industri 4.0 saat ini. Perkembangan teknologi memudahkan orang mengakses informasi dengan cepat. Hal ini juga di manfaatkan oleh Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon dalam memberikan informasi mengenai lembaga pendidikannya sehingga tanah wakaf menjadi produktif dan berdaya guna²¹

Berdasarkan hasil analisis dari penjelasan diatas, pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon telah memenuhi standar indikator prinsip transparansi (*transparancy*). Sehingga penerapan prinsip transparansi (*transparancy*) bisa dilaksanakan dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menilai bahwa prinsip akuntabilitas pada Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon menunjukkan bahwa terdapat indikator yang belum terpenuhi sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Indikator Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

Indikator (Accountability)	Akuntabilitas	Terlaksana	
		Ya	Tidak
Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat		✓	
Komite audit dan manajemen resiko			✓
Koordinasi program kerja		✓	
Evaluasi program kerja/kegiatan		✓	

Sumber: diolah data lapangan, 30 Januari 2020

a. Penyiapan Laporan Keuangan Secara Cepat dan Tepat

Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon menyiapkan laporan keuangan dan melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Mervita Sari, S.E., Ak., selaku Pengelola Sistem Akuntansi Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon, pada tanggal 27 Januari 2020, pukul 11:30 WIB

²⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba PSAK No. 45*, (Jakarta: IAI, 2010), hal. 1

²¹ Wawancara dengan Bapak H. Emil Rosmali, S.E., M.M., M.H., pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 09:00 WIB

program. Kecepatan dan ketepatan dalam pembuatan laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan secara berkala terkait pemberdayaan harta wakaf yang dikelola. Setiap akhir tahun per 31 Desember akan dilihat laporan keuangan bersama dewan pembina, dewan pengurus, dan dewan pengelola yayasan yang dimonitoring oleh pajak.²²

b. Komite Audit dan Manajemen Resiko

Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon memiliki dewan pengawas intenal atau audit internal yang dikepalai bagian verifikasi. Bagian verifikasi bertugas untuk memeriksa anggaran masuk dan anggaran yang telah dibelanjakan serta memeriksa laporannya. Rencana kedepan Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon akan membentuk Komite Audit dan Manajemen Resiko untuk meminimalisir bentuk-bentuk resiko yang akan terjadi dikemudian hari dan pengelolaan wakaf produktif bisa berjalan efektif dan efisien.²³

c. Koordinasi Program Kerja

Koordinasi program kerja melalui monitoring. Monitoring dalam hal ini semua yang terlibat dalam operasional adalah nadzhir wakaf sehingga mereka terjun langsung dalam mengelola harta wakaf yang ada di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon. Sehingga para nadzhir saling berkoordinasi dalam melaksanakan program kerjanya.

d. Evaluasi Program Kerja

Proses evaluasi berlangsung di awal tahun ajaran yang dilakukan rapat evaluasi mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Rapat evaluasi yang dilakukan mendapatkan hasil dan memberikan manfaat untuk para nadzhir wakaf agar tetap pada perencanaan awal.²⁴

Berdasarkan hasil analisis dari penjelasan diatas, pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon mengarah pada standar indikator prinsip akuntabilitas (*accountability*). Sehingga penerapan prinsip transparansi (*accountability*) bisa diarahkan dalam melaksanakan pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menilai bahwa prinsip responsibilitas pada Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon menunjukkan bahwa indikator-indikator telah dilaksanakan dengan baik sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Indikator Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Indikator (<i>Responsibility</i>)	Responsibilitas	Terlaksana	
		Ya	Tidak
Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan		✓	
Kewajiban sosial perusahaan (CSR)		✓	

²² Wawancara dengan Ibu Dwi Murni, S.E., pada tanggal 27 Januari 2020, pukul 11:30 WIB

²³ *Ibid.*,

²⁴ Wawancara dengan Bapak H. Emil Rosmali, S.E., M.M., M.H., pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 09:00 WIB

Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan	✓	
Etika, moral, dan akhlak	✓	

Sumber: diolah data lapangan, 31 Januari 2020

a. Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan

Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap anggaran dasar lembaga peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan wakaf produktif, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

b. Kewajiban Sosial Perusahaan (CSR) dan Kemitraan dengan Masyarakat atau Bina Lingkungan

Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon setiap tahun selalu mengadakan acara pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Menjelang Idul Fitri Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon mengadakan kegiatan membagikan bingkisan atau bakti sosial berupa paket sembako dan santunan kepada fakir miskin, anak yatim, panti asuhan dan korban kecelakaan serta zakat fitrah kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan (mustahiq). Pada saat Idul Adha Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon membagikan kurban kepada masyarakat sekitar. Selain itu juga ada kegiatan sunnatan massal untuk anak laki-laki dan rutin mengeluarkan infak dan shadaqoh melalui lembaga yang professional seperti Yatim Mandiri, DPU-DT, dan Daarul Qur'an.²⁵

c. Etika, Moral, dan Akhlak

Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon menerapkan prinsip-prinsip bernafaskan islam yang mengedepankan etika, moral, dan akhlak terhadap semua orang yang terlibat di dalam operassional kegiatan wakaf produktif. Gaya berpakaian guru-guru dan pegawai bernada keislaman. Para guru dan pegawai perempuan berbusana muslimah mengenakan gamis dan jilbab panjang yang menutup dada sedangkan untuk para guru dan pegawai laki-laki berbusana muslim memakai peci, berpakaian rapi dan mengenakan celana dasar.

Berdasarkan hasil analisis dari penjelasan diatas, pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon telah memenuhi standar indikator prinsip responsibilitas (*responsibility*). Sehingga penerapan prinsip responsibilitas (*responsibility*) bisa dilaksanakan dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon.

4. Independensi (*Independency*)

²⁵ Wawancara dengan Ibu Hj. Desmawati, S.E., M.Si., pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 09:00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menilai bahwa prinsip independensi pada Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon menunjukkan bahwa indikator-indikator telah dilaksanakan dengan baik sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Indikator Prinsip Independensi (*Independency*)

Indikator Independensi (<i>Independency</i>)	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Program dan aktivitas bersifat independent dan bebas	✓	
Kondisi bahwa pihak luar dilarang mencampuri urusan lembaga	✓	
Kondisi menghindari kepentingan pihak luar	✓	
Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ dalam lembaga	✓	

Sumber: diolah data lapangan, 03 Februari 2020

a. Program dan Aktivitas Bersifat Independen dan Bebas

Banyak sekali pihak luar yang ingin mengintervensi Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon. Salah satunya ada yang datang dari luar negeri dengan semua janji emas berupa bantuan dalam pengelolaan wakaf produktif. Namun Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon dengan tegas menolak dikarenakan Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon ingin berdiri sendiri dari hasil dan usaha sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar.²⁶

b. Kondisi Bahwa Pihak Luar Dilarang Mencampuri Urusan Lembaga dan Kondisi Menghindari Kepentingan Pihak Luar

Selain itu juga bentuk independensi Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon ketika membuka lowongan pekerjaan atau rekrutmen bagi guru dan karyawan. Mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan dan berkompeten untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak ada yang namanya titip-menitip pelamar yang dalam hal ini banyak dilakukan oleh beberapa pihak.²⁷

c. Adanya Pedoman yang Jelas dan Tegas Tentang Eksistensi Organ dalam Lembaga

Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon memiliki pedoman yang jelas dan tegas. Pedoman dasar utama yang dimiliki Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon adalah Al-Quran dan Hadits. Selain itu Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon memiliki Standar Operasional Perusahaan (SOP). Semua orang yang terlibat dalam operasional bekerja sesuai dengan job descnya masing-masing sesuai

²⁶ Wawancara dengan Bapak H. Emil Rosmali, S.E., M.M., M.H., pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 09:00 WIB

²⁷ *Ibid.*,

dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon.

Berdasarkan hasil analisis dari penjelasan diatas, pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon telah memenuhi standar indikator prinsip independensi (*independency*). Sehingga penerapan prinsip independensi (*independency*) bisa dilaksanakan dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menilai bahwa prinsip kesetaraan dan kewajaran pada Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon menunjukkan bahwa indikator-indikator telah dilaksanakan dengan baik sebagai berikut:

Tabel 2.5.

Indikator Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Indikator Kewajaran dan Kesetaraan (<i>Fairness</i>)	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Terbuka dalam menerima kritik dan saran	✓	
Kondisi kerja yang baik dan aman	✓	
Keadaan memperlakukan dengan adil dan jujur	✓	

Sumber: diolah data lapangan, 03 Februari 2020

a. Terbuka dalam Menerima Kritik dan Saran

Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon telah memberikan kesempatan pada semua orang yang terlibat dalam operasional kegiatan sekolah dalam memberikan keluhan-keluhan berupa kritik dan saran yang disampaikan secara langsung melalui telepon ataupun tidak langsung melalui kotak kritik dan saran. Kritik dan saran yang diterima oleh pihak Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon akan dibahas, jika perlu dan serius akan ditindaklanjuti lebih jauh.²⁸

b. Kondisi Kerja yang Baik dan Aman dan Keadaan Memperlakukan dengan Adil dan Jujur

Salah satu prinsip keadilan yang diterapkan pada saat pembagian gaji guru dan karyawan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sistem pembagian gaji yang diterapkan sama seperti sistem pembagian gaji yang diterapkan kepada PNS yaitu gaji pokok, tunjangan, dan jabatan yang dikelola langsung oleh Divisi Keuangan dengan penerapan sistem *payroll*²⁹ gaji yang bekerjasama melalui Bank. Adapun bank yang bekerjasama dengan Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) , Bank Muamalat, Bank BNI Syariah. Sistem gaji yang diterapkan Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon adalah diakhir bulan.

²⁸ Wawancara dengan Ibu Dwi Murni, S.E., pada tanggal 27 Januari 2020, pukul 11:30 WIB

²⁹ *Payroll* gaji adalah sistem yang diterapkan bank untuk melayani pembayaran gaji karyawan secara langsung tanpa campur tangan pihak ketiga. Gaji karyawan akan langsung masuk ke dalam rekeningnya masing-masing melalui sistem dan tidak secara manual.

Berdasarkan hasil analisis dari penjelasan diatas, pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon telah memenuhi standar indikator prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Sehingga penerapan prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) bisa dilaksanakan dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), antara lain transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dapat diterapkan dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon untuk mendorong terciptanya tujuan utama dari wakaf yaitu meningkatkan perekonomian umat dan mencapai kesejahteraan umat.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon peneliti mencoba menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk lembaga pendidikan islam. Proses pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf produktif dilakukan secara berkala dan bertahap dengan pembangunan-pembangunan gedung-gedung sekolah baru, perbaikan dan rehabilitas gedung-gedung sekolah yang lama, serta pengembangan unit-unit usaha yang lebih banyak dan produktif dan hasilnya dikembalikan untuk umat dalam bentuk penyaluran baik langsung ataupun tidak langsung.
2. Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon telah memenuhi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* melalui prinsip-prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) telah terlaksana dengan baik seperti sosialisai rencana kerja tahunan, penyediaan laporan keuangan secara berkala, sistem akuntansi berbasis standar akuntansi, penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan, penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat, terlaksananya audit internal, adanya monitoring dan evaluasi terkait program kerja, mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, adanya kewajiban sosial perusahaan, menjalin kemitraan dengan masyarakat, mengedepankan etika, moral, dan akhlak, menjalankan program dan aktivitas yang bersifat independent dan bebas, menerapkan bahwa pihak luar dilarang mencampuri urusan lembaga, menghindari kepentingan pihak luar, penerapan pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ dalam lembaga, terbuka dalam menerima kritik dan saran, penerapan kondisi kerja yang baik dan aman, memperlakukan guru dan karyawan dengan adil dan jujur. Walaupun ada prinsip yang belum sepenuhnya memenuhi indikator, yaitu prinsip akuntabilitas pada indikator

komite audit dan manajemen resiko. Namun hal itu tidak sepenuhnya menjadi kendala dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon.

SARAN

Bagi peneliti selanjutnya perlu dikaji tentang diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan kedepannya dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Arief Budiman, *Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf*, Jurnal Walisongo, Vol. 19 No. 1.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).
- Endriyana, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2000.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba PSAK No. 45*, (Jakarta: IAI, 2010).
- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Konsultan Aktuaria Indonesia*, (Jakarta: KNKG, 2011).
- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Indonesia*, (Jakarta: KNKG, 2008).
- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: KNKG, 2006).
- Mochamad Fariz Irianto, *Implementasi Good Corporate Governance Dalam Upaya Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Kota Batu Jawa Timur)*, Thesis, Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996).
- Paul C. Cozby, *Methods in Behavioral Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016).
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

- Sony Warsono dkk., *Coorporate Governance: Concept and Model*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, 2009).
- Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).
- Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.
- Wawancara dengan Bapak H. Emil Rosmali, S.E., M.M., M.H., selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon, pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 09:00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Dwi Murni, S.E., selaku Kepala Keuangan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon, pada tanggal 27 Januari 2020, pukul 11:20 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Hj. Desmawati, S.E., M.Si., selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon, pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 09:00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Mervita Sari, S.E., Ak., selaku Pengelola Sistem Akuntansi Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon, pada tanggal 27 Januari 2020, pukul 11:30 WIB.